

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, H. (2006). *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refka Aditama.
- Adonara, F. F. (2014). *Aspek Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: The World Bank.
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1986). *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hartono, S. (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bengkulu: Bina Cipta.
- Ibrahim, D. J. (2004). *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum*. Bandung: Positif. CV, Utomo.
- Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Manulang, F. M. (2007). *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakasa.
- Meliala, A. Q. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhammad, A. k. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Noor, A. (2006). *Konsep Hak Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- PARLINDUNGAN, A. (1993). *Komentor Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (1978). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PRADNYA PARAMITA.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sumarja, F. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Lampung: Universitas Lampung.
- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wibawanti, E. S. (2013). *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: LEKKAS.
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian

Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

UUD 1945 Amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, (1945).

C. Sumber Lain

Abdullah, J. (2015). *ANALISIS ASAS KONSENSUALISME DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Vol. 8, Issue 2).

Ayuningtyas, Nandia, A. (2016). *Hak Atas Informasi Dalam Perjanjian Jual Beli Apartment Jakarta Selatan* (Issue July). Universitas Islam Indonesia.

Budhayati, C. T. (n.d.). *ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA*.

Darus Badruzalman, M. (2001). *KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. pt. alumni.

Ekawati, R., Wilayah, D., Bontang, K., Kecamatan, K., Utara, B., & Ekawati, R. (n.d.). *Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang*.

Erik Krismeina Legawantara, M., Gde Dwi Arini, D., & Putu Suryani, L. (n.d.). *AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH*.

Ghani, W. (2016). *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Pt. Bank Danamon, Tbk. Kanwil Balikpapan*. universitas islam indonesia.

Hairan. (n.d.). *Pendaftaran Tanah Dalam Sertifikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (The Land Registration in The Certification of Rights Pursuant to Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)*.

Hasibuan Ardiansyah. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI)*.

Hetharie, Y. (n.d.). *Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 25(1), p-ISSN.

I Wayan Werasmana Sancaya. (n.d.-a). *44083-ID-kekuatan-mengikat-perjanjian-nominee-dalam-penguasaan-hak-milik-atas-tanah*.

- I Wayan Werasmana Sancaya. (n.d.-b). *KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN NOMINEE DALAM PENGUASAAN HAK MILIK ATASTANAH.*
- Indra Roy Briando. (n.d.). *PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI INSTRUMEN PENGHINDARAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS.*
- Insan Kamil, A., Ndaru Sonatra, P., & Pratama UNS Surakarta, N. (2014a). HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF (MENYOROT PERJANJIAN BERNAMA DENGAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA). *Jurnal Serambi Hukum, 08.*
- Insan Kamil, A., Ndaru Sonatra, P., & Pratama UNS Surakarta, N. (2014b). HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF (MENYOROT PERJANJIAN BERNAMA DENGAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA). *Jurnal Serambi Hukum, 08.*
- Kadir Putra, J., & Alfathania.H, R. (2020). Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(2)*, 326. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.723>
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press.
- KHOERON. (2019). *PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL)*.
- M. Muhtarom. (2014). *asas perjanjian hukum.*
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada.
- Nugroho Wahyu. (2017). *REKONSTRUKSI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN KEDALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM PASCA REFORMASI DALAM BANGUNAN NEGARA HUKUM.*
- NURBIANTARA, M. R. (2020). *TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE.*
- Putu, N., Kusumawati, M. V., Ketut, N., Adnyani, S., & Sudiarmaka, K. (2020). *KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 (Vol. 3, Issue 2).*
- Ratih Saraswati**, A. A., & Westra, K. (n.d.-a). *PERJANJIAN NOMINEE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**.

- Ratih Saraswati**, A. A., & Westra, K. (n.d.-b). *PERJANJIAN NOMINEE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**.
- Rejekiningsih, T. (2016). ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA). In *Asas Fungsi Sosial* (Vol. 5, Issue 2).
- Riski, A. (2016). *kewenangan MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur (positive legislature) dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.*
- SARAS LARASATI. (2018). *PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA) ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA.*
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Sidharta, A. (2004). *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law",. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).*
- TONY. (2015). *Penyelesaian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacat Hukum Administratif dikantor Pertanahan Kota Batam,.*
- TUNJAN LEPTOHOEVE TOBIAS. (n.d.). *PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN, KALIMANTAN TENGAH.*
- Yonatan Parmahan Sibuea, H., Kunci, K., Tanah Untuk Pertama Kali, P., Tanah Sistematis, P., Hukum, K., & Latar Belakang, S. A. (2016). *ARTI PENTING PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI.*